

Laporan Keuangan Triwulan III 2023

**RRI Lhokseumawe**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 September 2023

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

RRI Lhokseumawe adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada RRI Lhokseumawe. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Lhokseumawe, 12 Oktober 2023

Kepala Kantor RRI Lhokseumawe



The image shows a circular official stamp of RRI Lhokseumawe. The stamp contains the text 'LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK REPUBLIK INDONESIA' around the perimeter and 'RRI LHOKSEUMAWE' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Siti Saraswulan, S.Sn., M.Sn.

NIP. 19690511 200003 2 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	4
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	14
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Piutang Bukan Pajak	
C.3 Persediaan	
C.4 Tanah	
C.5 Peralatan dan Mesin	
C.6 Gedung dan Bangunan	
C.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.8 Aset Tetap Lainnya	
C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.10 Utang kepada Pihak Ketiga	
C.11 Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.12 Pendapatan Diterima Dimuka	
C.13 Uang Muka dari KPPN	
C.14 Ekuitas	
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	18
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2 Beban Pegawai	
D.3 Beban Persediaan	
D.4 Beban Barang dan Jasa	
D.5 Beban Pemeliharaan	
D.6 Beban Perjalanan Dinas	
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.8 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	21
E.1 Ekuitas Awal	
E.2 Surplus (Defisit) LO	
E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5 Transaksi Antar Entitas	
E.6 Ekuitas Akhir	
VI. Lampiran dan Daftar	

## DAFTAR TABEL

1	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	10
2	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Triwulan III TA 2023 dan 2022	10
3	Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Triwulan III TA 2023 dan 2022	10
4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Triwulan III TA 2023	11
5	Perbandingan Belanja Pegawai Triwulan III TA 2023 dan 2022	11
6	Perbandingan Belanja Barang Triwulan III TA 2023 dan 2022	12
7	Perbandingan Belanja Modal Triwulan III TA 2023 dan 2022	12
8	Realisasi Anggaran Prioritas Nasional VI TA 2023	13
9	Realisasi Anggaran Prioritas Nasional VII TA 2023	13
10	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Triwulan III TA 2023 dan 2022	14
11	Rincian Piutang Bukan Pajak Triwulan III TA 2023 dan 2022	14
12	Rincian Persediaan Triwulan III TA 2023 dan 2022	14
13	Rincian Tanah Triwulan III TA 2023	15
14	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Triwulan III Tahun 2023	16
15	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	17
16	Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan	17
17	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut	17
18	Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :	17
19	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Triwulan III TA 2023 dan 2022	18
20	Rincian Beban Pegawai Triwulan III TA 2023 dan 2022	18
21	Rincian Beban Persediaan Triwulan III TA 2023 dan 2022	19
22	Rincian Beban Barang dan Jasa Triwulan III TA 2023 dan 2022	19
23	Rincian Beban Pemeliharaan Triwulan III TA 2023 dan 2022	20
24	Rincian Beban Perjalanan Dinas Triwulan III TA 2023 dan 2022	20
25	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Triwulan III TA 2023 dan 2022	20
26	Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Triwulan III TA 2023 dan 2022	20
27	Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 30 September 2023	21
28	Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 September 2023	21
29	Rincian Transfer Keluar Tahun 2023	21

## DAFTAR GRAFIK

---

- Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2023

11

## DAFTAR LAMPIRAN

---

LAMPIRAN	I	OUTPUT LAPORAN DARI SAKTI DAN/ATAU MONSAKTI
LAMPIRAN	II	LPJ BENDAHARA SEPTEMBER 2023
LAMPIRAN	III	LAPORAN BMN DAN DOKUMEN PENDUKUNG
LAMPIRAN	IV	MEMO PENYESUAIAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG
LAMPIRAN	V	KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan RRI Lhokseumawe yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 30 September 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Lhokseumawe, 12 Oktober 2023  
Kepala Kantor RRI Lhokseumawe



Siti Saraswulan, S.Sn., M.Sn. *[Signature]*  
NIP. 196905112000032001

## RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan RRI Lhokseumawe Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 September 2023 adalah sebesar Rp444.893.750 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp444.893.750 atau mencapai 514,03 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp86.550.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 September 2023 adalah sebesar Rp5.318.749.358 atau mencapai 68,32 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp7.784.961.000.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 30 September 2023. Nilai Aset per 30 September 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp14.328.978.153 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp70.076.000; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp14.258.902.153 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp659.797.421 dan Rp13.669.180.732

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 30 September 2023 adalah sebesar Rp258.489.383 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp6.028.645.207 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-5.770.155.824, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp15.450.000 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-5.754.705.824.

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp13.350.950.830, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-5.754.705.824 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar 1.088.185.668 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 4.984.750.058 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2023 adalah senilai Rp13.669.180.732

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2023 DAN 30 SEPTEMBER 2022**

URAIAN	Catatan	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>B.1</b>				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	86.550.000	444.893.750	514,03	76.674.670
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>86.550.000</b>	<b>444.893.750</b>	<b>514,03</b>	<b>76.674.670</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2</b>				
Belanja Pegawai	B.2.1	5.520.920.000	4.038.009.128	73,14	3.869.016.458
Belanja Barang	B.2.2	2.264.041.000	1.280.740.230	56,57	1.229.956.133
Belanja Modal	B.2.3	-	-	-	49.955.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>7.784.961.000</b>	<b>5.318.749.358</b>	<b>68,32</b>	<b>5.148.927.591</b>

  
 Lhokseumawe, 12 Oktober 2023  
 Kepala Kantor RRI Lhokseumawe  
 Siti Saraswulan, S.Sn., M.Sn.  
 NIP. 19690511 200002 2 001

**NERACA**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

URAIAN	Catatan	2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	60.000.000	-
Piutang Bukan Pajak	C.2	445.000	-
Persediaan	C.3	9.631.000	102.718.600
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>70.076.000</b>	<b>102.718.600</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.4	5.497.705.000	5.497.705.000
Peralatan dan Mesin	C.5	8.679.486.096	10.602.641.096
Gedung dan Bangunan	C.6	8.785.167.500	6.731.522.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.7	591.199.000	591.199.000
Aset Tetap Lainnya	C.8	63.975.000	63.975.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	(9.358.630.443)	(10.075.328.079)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>14.258.902.153</b>	<b>13.411.714.017</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>14.328.978.153</b>	<b>13.514.432.617</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.10	217.524.504	72.463.037
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.11	1.115.000	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.12	381.157.917	91.018.750
Uang Muka dari KPPN	C.13	60.000.000	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>659.797.421</b>	<b>163.481.787</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>659.797.421</b>	<b>163.481.787</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.14	13.669.180.732	13.350.950.830
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>13.669.180.732</b>	<b>13.350.950.830</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>14.328.978.153</b>	<b>13.514.432.617</b>

Lhokseumawe, 12 Oktober 2023  
Kepala Kantor RRI Lhokseumawe



Siti Saraswulan, S.Sn., M.Sn.  
NIP. 19690511 200003 2 001

## LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2023 DAN 30 SEPTEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	258.489.383	76.770.840
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>258.489.383</b>	<b>76.770.840</b>
<b>BEBAN</b>			
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	D.2	4.226.733.432	3.986.321.519
Beban Persediaan	D.3	42.712.500	58.880.300
Beban Barang dan Jasa	D.4	984.131.629	733.714.503
Beban Pemeliharaan	D.5	358.605.524	137.349.084
Beban Perjalanan Dinas	D.6	64.570.140	286.966.500
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	351.891.982	315.669.132
<b>Jumlah Beban</b>		<b>6.028.645.207</b>	<b>5.518.901.038</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(5.770.155.824)</b>	<b>(5.442.130.198)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	15.450.000	-
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>15.450.000</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>(5.754.705.824)</b>	<b>(5.442.130.198)</b>

Lhokseumawe, 12 Oktober 2023  
Kepala Kantor RRI Lhokseumawe



**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2023 DAN 30 SEPTEMBER 2022**

*(Dalam Rupiah)*

<b>URAIAN</b>	<b>Catatan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	13.350.950.830	13.428.095.846
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2	(5.754.705.824)	(5.442.130.198)
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	E.4	1.088.185.668	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	1.088.185.668	-
<b>Jumlah</b>		<b>1.088.185.668</b>	<b>-</b>
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.5	4.984.750.058	5.072.252.921
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>		318.229.902	(369.877.277)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.6	<b>13.669.180.732</b>	<b>13.058.218.569</b>

Lhokseumawe, 12 Oktober 2023  
Kepala Kantor RRI Lhokseumawe

  
 Siti Saraswulan, S.Sn., M.Sn.  
 NIP. 19690511 200003 2 001

**A. PENJELASAN UMUM**

**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis**

*Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis*

**1. Bentuk Badan Hukum RRI**

RRI adalah satu – satunya radio yang menyandang nama negara yang siarannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional.

RRI didirikan pada tanggal 11 September 1945 oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang. Sejalan dengan perkembangan zaman, RRI mengalami berbagai perubahan bentuk badan hukum dan organisasi yaitu mulai dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Penerangan, Perusahaan Jawatan (Perjan) pada tahun 2000, dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 'LPP RRI' sejak tahun 2005.

**2. Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- b. Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
- c. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- d. Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor : 2957 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi LPP RRI

**3. Visi RRI**

Terwujudnya RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang Terpercaya dan Mendunia.

**4. Misi RRI**

1. Menjamin terpenuhinya hak warga Negara terhadap kebutuhan Informasi yang objektif dan independen sehingga memberikan kepastian dan rasa aman kepada warga Negara, serta menjadi referensi bagi pengambilan keputusan.
2. Menjamin terpenuhinya hak warga negara terhadap pendidikan melalui siaran yang mencerdaskan dan hiburan yang sehat serta berpihak kepada kelompok rentan (pengungsi, orang terlantar, pekerja migran, pribumi, anak, perempuan, minoritas dan suku terasing) serta disable.
3. Memperkuat kebhinekaan melalui siaran budaya yang mencerminkan identitas bangsa.
4. Menjamin siaran yang mudah diakses sehingga kehadiran negara dalam pelayanan informasi dirasakan oleh seluruh warga negara.
5. Menghadirkan siaran di daerah perbatasan, terpencil, terluar dan pesisir sebagai representasi negara dalam konteks menjadikan daerah pinggiran sebagai pusat aktivitas kultural.
6. Menyelenggarakan siaran luar negeri untuk mempromosikan budaya beserta ideologi Indonesia dan menghadirkan kebudayaan dunia ke Indonesia.
7. Menjamin penyelenggaraan LPP RRI dengan tata kelola yang sesuai dengan prinsip *good public governance*.
8. Melibatkan partisipasi publik dalam pengelolaan LPP RRI.
9. Mengembangkan SDM yang mendukung kebutuhan Lembaga Penyiaran Publik yang terpercaya dan terkemuka.
10. Mengoptimalkan potensi yang dimiliki RRI sebagai sumber pendapatan yang dijamin oleh aturan perundangan untuk memperkuat keberadaan LPP RRI.

**5. Tugas dan Fungsi RRI**

Sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, tugas dan fungsi didirikannya RRI adalah untuk:

- a. Mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, RRI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - 1) Perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio publik;
  - 2) Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio publik;
  - 3) Pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya RRI;

**6. Tujuan**

Dengan 10 (sepuluh) misi yang telah dirumuskan untuk mewujudkan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan mendunia, selanjutnya dirumuskan tujuan yang hendak dicapai selama satu periode kepemimpinan ke depan. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh RRI sebagai lembaga penyiaran publik pada periode 2020-2024 adalah memberikan layanan informasi yang Independen, netral dan akurat, mempunyai nilai pendidikan, dan hiburan yang sehat yang menjunjung tinggi keberagaman, identitas nasional, dan mendukung diplomasi Indonesia di tingkat global dengan berpegang pada prinsip *good public governance*.

**7. Sasaran**

- a. Tersedianya akses dan program informasi yang akurat, mempunyai nilai, pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio.
- b. Terwujudnya tata kelola LPP RRI berdasarkan prinsip *good public governance*.

## A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan  
Penyusunan Laporan  
Keuangan*

Laporan Keuangan periode 30 September 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh RRI Lhokseumawe. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

*Basis Akuntansi*

## A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar Pengukuran*

## A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan Akuntansi*

## A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari RRI Lhokseumawe. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-LRA*

### (1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

### (2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### Belanja

#### (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

### Beban

#### (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### Aset

#### (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

#### Aset Tetap

#### b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

#### Penyusutan Aset Tetap

#### c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap**

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### Piutang Jangka Panjang

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

#### Aset Lainnya

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

**Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud**

<b>Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (Tahun)</b>
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2023	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	86.550.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>-</b>	<b>86.550.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	6.095.914.000	5.520.920.000
Belanja Barang	2.139.041.000	2.264.041.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>8.234.955.000</b>	<b>7.784.961.000</b>

Realisasi Pendapatan  
Rp444.893.750

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp444.893.750 atau mencapai 514,03 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp86.550.000. Pendapatan RRI Lhokseumawe terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp444.893.750. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya bertambahnya perolehan pendapatan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	86.550.000	444.893.750	514,03
<b>Jumlah</b>	<b>86.550.000</b>	<b>444.893.750</b>	<b>514,03</b>

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 480,24 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

#### Perbandingan Realisasi Pendapatan Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	444.893.750	76.674.670	480,24
<b>Jumlah</b>	<b>444.893.750</b>	<b>76.674.670</b>	<b>480,24</b>

Realisasi Penerimaan  
Negara Bukan Pajak  
Rp444.893.750

### B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing- masing sebesar Rp444.893.750 dan Rp76.674.670. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 480,24 dari TA 2022 dikarenakan terdapatnya kenaikan signifikan atas pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tuisi dari penyewaan tower. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

#### Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	444.893.750	76.674.670	480,24
<b>Jumlah</b>	<b>444.893.750</b>	<b>76.674.670</b>	<b>480,24</b>

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut :

#### Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.615.000	3.452.170	33,68
Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	44.230.000	73.222.500	(39,60)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	15.450.000	-	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tuisi	380.598.750	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>444.893.750</b>	<b>76.674.670</b>	<b>480,24</b>

## B.2 Belanja

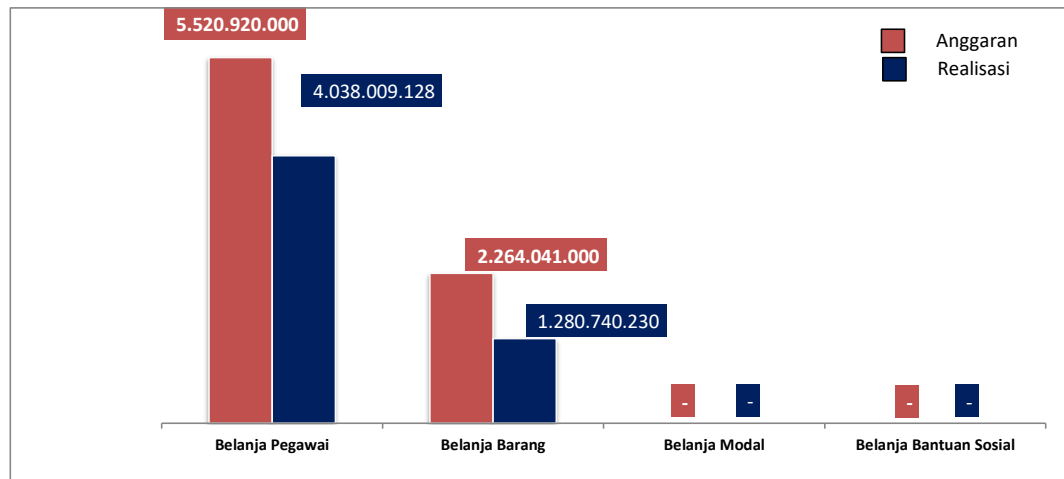
Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp5.318.749.358 atau 68,32 % dari anggaran belanja sebesar Rp.7.784.961.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Triwulan III TA 2023

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	5.520.920.000	4.038.009.128	73,14
Belanja Barang	2.264.041.000	1.280.740.230	56,57
<b>Jumlah</b>	<b>7.784.961.000</b>	<b>5.318.749.358</b>	<b>68,32</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2023



Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,30% terdapatnya peningkatan anggaran belanja pada tahun anggaran berjalan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Berikut rincian realisasi belanja TA 2023 dan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Pegawai	4.038.009.128	3.869.016.458	4,37
Belanja Barang	1.280.740.230	1.229.956.133	4,13
Belanja Modal	-	49.955.000	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>5.318.749.358</b>	<b>5.148.927.591</b>	<b>3,30</b>

### B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.038.009.128 dan Rp3.869.016.458. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,37 % dari TA 2022. Hal ini disebabkan adanya peningkatan alokasi anggaran belanja pegawai dibandingkan tahun anggaran sebelumnya dan disebabkan oleh adanya peningkatan status pegawai yang awalnya CPNS menjadi PNS serta perubahan status pegawai yang awalnya PBPNS/PPNPN menjadi PPPK

Perbandingan Belanja Pegawai Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Gaji Pokok PNS	635.840.860	571.621.640	11,23
Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.033	8.306	32,83
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	38.398.538	37.052.212	3,63
Belanja Tunj. Anak PNS	12.472.084	12.562.836	(0,72)
Belanja Tunj. Struktural PNS	20.830.000	52.720.000	(60,49)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	107.156.000	45.668.000	134,64

Belanja Tunj. PPh PNS	4.194.538	2.765.726	51,66
Belanja Tunj. Beras PNS	32.371.740	31.285.440	3,47
Belanja Uang Makan PNS	84.127.000	78.300.000	7,44
Belanja Tunjangan Umum PNS	15.070.000	13.635.000	10,52
Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	439.397.200	1.390.438.100	(68,40)
Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	55.770.358	184.501.174	(69,77)
Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS	9.442	27.956	(66,23)
Belanja Tunjangan Lainnya Non PNS	71.470.000	222.390.000	(67,86)
Belanja Gaji Pokok PPPK	766.237.600	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	12.836	-	-
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	45.303.300	-	-
Belanja Tunjangan Anak PPPK	15.528.004	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	109.320.000	-	-
Belanja Tunjangan Beras PPPK	54.242.580	-	-
Belanja Uang Makan PPPK	156.656.000	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	789.992.466	1.242.870.188	(36,44)
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja/PPPK	586.061.474	-	-
<b>Jumlah Belanja kotor</b>	<b>4.040.473.053</b>	<b>3.885.846.578</b>	<b>3,98</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	2.463.925	16.830.120	(85,36)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.038.009.128</b>	<b>3.869.016.458</b>	<b>4,37</b>

Realisasi Belanja  
Barang  
Rp1.280.740.230

### B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.280.740.230 dan Rp1.229.956.133. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,13% dari Realisasi TA 2022.

Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya peningkatan alokasi anggaran belanja barang secara keseluruhan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya dan disebabkan oleh adanya belanja jasa outsourcing pada TA 2023 dan peningkatan belanja pemeliharaan yang dilaksanakan hingga periode Triwulan III TA 2023

Perbandingan Belanja Barang Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Barang Operasional	102.816.750	212.153.660	(51,54)
Belanja Barang Non Operasional	158.287.500	141.378.500	11,96
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	35.900.000	42.947.800	(16,41)
Belanja Jasa	646.835.416	407.081.589	58,90
Belanja Pemeliharaan	272.330.424	139.428.084	95,32
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	64.570.140	286.966.500	(77,50)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.280.740.230</b>	<b>1.229.956.133</b>	<b>4,13</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.280.740.230</b>	<b>1.229.956.133</b>	<b>4,13</b>

Realisasi Belanja Modal  
Rp0

### B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp49.955.000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh hingga periode Triwulan III TA 2023 belum adanya alokasi anggaran pada akun belanja modal.

Perbandingan Belanja Modal Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	49.955.000	(100,00)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>-</b>	<b>49.955.000</b>	<b>(100,00)</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>-</b>	<b>49.955.000</b>	<b>(100,00)</b>

#### B.2.4 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Lhokseumawe terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 5145.QMA.003 - Program Produksi Siaran Tanggap Bencana Prioritas Nasional dan 5145.QMA.002 - Gerakan Cerdas Memilih Prioritas Nasional dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut :

#### **Prioritas Nasional VI – Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.**

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 1 kegiatan prioritas, yang tersebar di 1 Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp. 47.311.000,- dan realisasi sebesar Rp. 42.391.500,- dengan rincian sebagai berikut.

*Realisasi Anggaran Prioritas Nasional VI TA 2023*

Nama Satker	Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
RRI Lhokseumawe	Program Produksi Siaran Tanggap Bencana Prioritas Nasional	47.311.000	42.391.500	89,6%	Layanan	1	0	0%

#### **Prioritas Nasional VII – Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.**

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 1 kegiatan prioritas, yang tersebar di 1 Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp. 104.420.000,- dan realisasi sebesar Rp. 104.420.000,- dengan rincian sebagai berikut.

*Realisasi Anggaran Prioritas Nasional VII TA 2023*

Nama Satker	Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
RRI Lhokseumawe	Gerakan Cerdas Memilih Prioritas Nasional	104.420.000	104.420.000	100%	Layanan	1	1	100%

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp60.000.000

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.60.000.000 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Triwulan III TA 2023 dan 2022*

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Uang Tunai pada Brankas Bendahara	22.446.200	-
Uang Rekening di Kas Bendahara	36.438.782	-
Kuintansi UP yang belum di SP2D kan	1.115.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>59.999.982</b>	<b>-</b>

*Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :*

kas di Bendahara Pengeluaran berasal dari UP RRI Lhokseumawe terdiri dari UP rupiah murni dan terdapat selisih Rp. 18,- karena tidak ada pecahan uang kecil

Piutang Bukan Pajak  
Rp445.000

### C.2 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp445.000 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Rincian Piutang Bukan Pajak Triwulan III TA 2023 dan 2022*

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Piutang Lainnya	445.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>445.000</b>	<b>-</b>

Persediaan  
Rp9.631.000

### C.3 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 30 September 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp9.631.000 dan Rp102.718.600. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 September 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan Triwulan III TA 2023 dan 2022*

Jenis	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Barang Konsumsi	9.631.000	13.946.600
Suku Cadang	-	88.772.000
<b>Jumlah</b>	<b>9.631.000</b>	<b>102.718.600</b>

Persediaan tersebut di atas dalam kondisi baik

Tanah  
Rp5.497.705.000

### C.4 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp5.497.705.000 dan Rp5.497.705.000. Nilai Tanah tersebut tidak ada kenaikan nilai tanah periode laporan Triwulan III 2023 dengan periode sebelumnya. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023</b>	<b>5.497.705.000</b>
<b>Mutasi tambah :</b>	
	-
<b>Mutasi kurang :</b>	
	-
<b>Saldo per 30 September 2023</b>	<b>5.497.705.000</b>

Rincian saldo Tanah per 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Tanah Triwulan III TA 2023*

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	4.027	Jl. Petua Ibrahim No. 75 Teumpok Teungoh Kota Lhokseumawe	1.268.946.000
2	11.907	Jl. Medan - Banda Aceh Desa Pulo Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara	4.228.759.000
<b>Jumlah</b>			<b>5.497.705.000</b>

*Penjelasan tentang kondisi Tanah*

Tanah telah memiliki Sertifikat Atas Nama LPP RRI

*Peralatan dan Mesin  
Rp8.679.486.096*

**C.5 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 September 2023 dan 2022 adalah Rp8.679.486.096 dan Rp10.602.641.096. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023</b>	<b>10.602.641.096</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Transfer Masuk	130.490.500
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Reklasifikasi Keluar	2.053.645.500
<b>Saldo per 30 September 2023</b>	<b>8.679.486.096</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2023	(7.153.280.649)
<b>Nilai Buku per 30 September 2023</b>	<b>1.526.205.447</b>

*Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:*

berasal dari transfer masuk berupa Lap Top, Kabel, Receiver STL/VHF (FM), Peralatan Antena Penerima VHF, dan Power Transmitter yang berasal dari entitas Kantor Pusat LPP RRI

*Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:*

diperoleh atas Reklasifikasi Keluar Barang Milik Negara atas bangunan menara radio sesuai Berita Acara Reklasifikasi Nomor : B-486/RRI-LSW/09/2023 Tanggal 19 September 2023

*Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.*

*Gedung dan Bangunan  
Rp8.785.167.500*

**C.6 Gedung dan Bangunan**

Saldo Gedung dan Bangunan per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.785.167.500 dan Rp6.731.522.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023</b>	<b>6.731.522.000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Reklasifikasi Masuk	2.053.645.500
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
<b>Saldo per 30 September 2023</b>	<b>8.785.167.500</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2023	(1.975.053.306)
<b>Nilai Buku per 30 September 2023</b>	<b>6.810.114.194</b>

*Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:*

diperoleh atas Reklasifikasi Masuk Barang Milik Negara atas bangunan menara radio sesuai Berita Acara Reklasifikasi Nomor : B-486/RRI-LSW/09/2023 Tanggal 19 September 2023

*Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:*

tidak terdapat mutasi kurang pada periode Triwulan III 2023

*Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.*

### C.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 September 2023 dan 2022 adalah Rp.591.199.000 dan Rp.591.199.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023</b>	<b>591.199.000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
<b>Saldo per</b>	<b>591.199.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d.	(175.321.488)
<b>Nilai Buku per</b>	<b>415.877.512</b>

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:  
tidak terdapat mutasi tambah pada periode Triwulan III 2023

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:  
tidak terdapat mutasi kurang pada periode Triwulan III 2023

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

### C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 September 2023 dan 2022 adalah Rp.63.975.000 dan Rp.63.975.000. Aset tetap tersebut alat musik tradisional/daerah dan alat musik modern/band. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023</b>	<b>63.975.000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
	-
<b>Saldo per 30 September 2023</b>	<b>63.975.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2023	(54.975.000)
<b>Nilai Buku per 30 September 2023</b>	<b>9.000.000</b>

Mutasi tambah/kurang:  
tidak terdapat mutasi kurang pada periode Triwulan III 2023

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

### C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp9.358.630.443 dan Rp10.075.328.079. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Triwulan III Tahun 2023

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	8.679.486.096	(7.153.280.649)	1.526.205.447
2	Gedung dan Bangunan	8.785.167.500	(1.975.053.306)	6.810.114.194
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	591.199.000	(175.321.488)	415.877.512
4	Aset Tetap Lainnya	63.975.000	(54.975.000)	9.000.000
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>18.119.827.596</b>	<b>(9.358.630.443)</b>	<b>8.761.197.153</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Utang kepada Pihak  
Ketiga Rp217.524.504

### C.10 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp217.524.504 dan Rp72.463.037. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

#### Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	217.524.504	28.800.200
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	-	43.662.837
<b>Total</b>	<b>217.524.504</b>	<b>72.463.037</b>

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

terdiri dari beban pegawai yang masih harus dibayar atas SPM atas Gaji Induk PNS, PPPK, dan PPNPN Oktober 2023 yang belum terbit SP2D

Utang Yang Belum  
Ditagihkan Rp1.115.000

### C.11 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.115.000 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

#### Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	1.115.000	-
<b>Total</b>	<b>1.115.000</b>	<b>-</b>

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

atas Rincian BAST/SPBy Belum SPP atau Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan

Pendapatan Diterima  
Dimuka Rp381.157.917

### C.12 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp381.157.917 dan Rp91.018.750. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2022
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	381.157.917	91.018.750
<b>Total</b>	<b>381.157.917</b>	<b>91.018.750</b>

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Pendapatan yang terima dimuka berasal dari sewa tower an. PT Indosat Tbk sebesar Rp. 380.598.750,- periode sampai dengan 29 September 2026 dan sewa kantin an. Usman Saleh sebesar Rp. 559.167,- periode sampai dengan 31 Agustus 2024 yang disewakan dengan pembayaran di awal kontrak.

Uang Muka dari KPPN  
Rp60.000.000

### C.13 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp60.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	60.000.000
<b>Total</b>	<b>60.000.000</b>

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

UP RRI Lhokseumawe terdiri dari UP rupiah murni

Ekuitas  
Rp13.669.180.732

### C.14 Ekuitas

Ekuitas per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13.669.180.732. dan Rp13.350.950.830. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan Negara  
Bukan Pajak  
Rp258.489.383

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp258.489.383 dan Rp76.770.840. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 236,70. Hal tersebut disebabkan oleh pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan diperoleh dari potongan SPM atas sewa rumah dinas sejumlah Rp. 4.450.000,- dan penyesuaian pendapatan sewa diterima dimuka atas sewa kantin sejumlah Rp. 450.833,-. Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai tusi sejumlah Rp. 90.618.750,-, dengan Pendapatan jasa siaran LPP RRI diperoleh atas jasa siaran iklan sejumlah Rp. 37.030.000,-, jasa non iklan sejumlah Rp. 7.200.000,-, serta dukungan layanan sejumlah Rp. 118.739.800,-. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Triwulan III TA 2023 dan 2022*

URAIAN	2023	2022	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.900.833	3.548.340,00	38,12
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	90.618.750	-	-
Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	162.969.800	73.222.500,00	122,57
<b>Jumlah</b>	<b>258.489.383,00</b>	<b>76.770.840,00</b>	<b>236,70</b>

Beban Pegawai  
Rp4.226.733.432

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.226.733.432 dan Rp3.986.321.519.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar 6,03 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan alokasi anggaran belanja pegawai dibandingkan tahun anggaran sebelumnya dan disebabkan oleh adanya peningkatan status pegawai yang awalnya CPNS menjadi PNS serta perubahan status pegawai yang awalnya PBPNS/PPNP menjadi PPPK. Rincian Beban Pegawai Triwulan III Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Pegawai Triwulan III TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Gaji Pokok PNS	692.253.520	627.933.520	10,24
Beban Pembulatan Gaji PNS	11.732	9.140	28,36
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	41.913.168	40.489.136	3,52
Beban Tunj. Anak PNS	13.574.042	13.721.288	(1,07)
Beban Tunj. Struktural PNS	22.630.000	38.720.000	(41,55)
Beban Tunj. Fungsional PNS	85.751.800	50.604.000	69,46
Beban Tunj. PPh PNS	4.292.628	2.866.337	49,76
Beban Tunj. Beras PNS	35.196.120	34.327.080	2,53
Beban Uang Makan PNS	84.127.000	78.300.000	7,44
Beban Tunjangan Umum PNS	15.790.000	15.270.000	3,41
Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	479.426.800	1.429.279.100	(66,46)
Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	60.843.104	189.512.934	(67,90)
Beban Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS	10.296	28.796	(64,25)
Beban Tunjangan Lainnya Non PNS	71.470.000	222.390.000	(67,86)
Beban Gaji Pokok PPPK	840.327.000	-	-
Beban Pembulatan Gaji PPPK	14.098	-	-
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	49.833.630	-	-
Beban Tunjangan Anak PPPK	17.001.734	-	-
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	120.100.000	-	-
Beban Tunjangan Beras PPPK	59.456.820	-	-
Beban Uang Makan PPPK	156.656.000	-	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	789.992.466	1.242.870.188	(36,44)
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja/P	586.061.474	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>4.226.733.432</b>	<b>3.986.321.519</b>	<b>6,03</b>

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp42.712.500 dan Rp58.880.300

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 27,46 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Persediaan konsumsi	42.712.500	58.880.300	(27,46)
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>42.712.500,00</b>	<b>58.880.300</b>	<b>(27,46)</b>

### D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp984.131.629 dan Rp733.714.503.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 34,13 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh adanya peningkatan beban barang dan jasa pada tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan peningkatan signifikan pada akun beban barang operasional lainnya atas kegiatan dukungan layanan dan pada akun beban jasa lainnya yang diperoleh atas belanja jasa outsourcing. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Keperluan Perkantoran	19.440.250	130.067.950	(85,05)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.328.500	4.597.710	(49,36)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	81.048.000	86.528.000	(6,33)
Beban Barang Operasional Lainnya	118.739.800	960.000	12.268,73
Beban Bahan	158.602.500	123.128.500	28,81
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	18.250.000	(100,00)
Beban Langganan Listrik	274.345.313	233.032.855	17,73
Beban Langganan Telepon	47.352.266	52.107.988	(9,13)
Beban Langganan Air	24.290.000	16.281.500	49,19
Beban Sewa	55.080.000	9.900.000	456,36
Beban Jasa Profesi	79.795.000	52.410.000	52,25
Beban Jasa Lainnya	123.110.000	6.450.000	1.808,68
<b>Jumlah</b>	<b>984.131.629</b>	<b>733.714.503,00</b>	<b>34,13</b>

### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp358.605.524 dan Rp137.349.084.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 161,09 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh adanya beban pemeliharaan gedung dan bangunan dan beban pemeliharaan lainnya atas pemeliharaan dan instalasi alat teknik serta beban persediaan suku cadang yang nilai cukup besar terealisasi hingga periode Triwulan III TA 2023 Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	119.799.430	10.727.000	1.016,80
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	83.587.094	100.789.284	(17,07)
Beban Pemeliharaan Jaringan	650.000	2.069.000	(68,58)
Beban Pemeliharaan Lainnya	65.397.000	22.427.800	191,59
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	1.336.000	(100,00)
Beban Persediaan suku cadang	88.772.000	-	-
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	400.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>358.605.524</b>	<b>137.349.084</b>	<b>161,09</b>

Beban Perjalanan Dinas  
Rp64.570.140

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp64.570.140 dan Rp286.966.500

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 77,50 persen disebabkan oleh masih terdapatnya automatic adjustment anggaran yang terjadi selama periode Semester I TA 2023 dan terdapat kegiatan perjalanan dinas yang belum dilakukan pertanggungjawaban. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Perjalanan Biasa	25.839.860	210.251.500	(87,71)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.440.000	71.840.000	(88,25)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	30.290.280	4.875.000	521,34
<b>Jumlah</b>	<b>64.570.140,00</b>	<b>286.966.500</b>	<b>(77,50)</b>

Beban Penyusutan dan  
Amortisasi  
Rp351.891.982

**D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp351.891.982 dan Rp315.669.132.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	234.594.896	218.100.523	7,56
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	109.920.212	81.511.835	34,85
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	8.679.900	(100,00)
Beban Penyusutan Irigasi	7.376.874	7.376.874	-
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>351.891.982</b>	<b>315.669.132</b>	<b>11,47</b>
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>351.891.982</b>	<b>315.669.132</b>	<b>11,47</b>

Surplus (Defisit) dari  
Kegiatan Non  
Operasional Lainnya  
Rp15.450.000

**D.8 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp15.450.000 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Triwulan III TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	15.450.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>15.450.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal  
Rp.13.350.950.830,00

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.13.350.950.830,00 dan Rp.13.428.095.846,00

Defisit LO  
Rp.5.754.705.824,00

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah sebesar Rp.5.754.705.824,00 dan Rp.5.442.130.198,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.088.185.668 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi  
Rp.1.088.185.668

#### E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.088.185.668 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 30 September 2023

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.088.185.668
<b>Jumlah</b>	<b>1.088.185.668,0</b>

Transaksi Antar Entitas  
Rp.4.984.750.058

### E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.4.984.750.058 dan Rp.5.072.252.921. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 September 2023

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.318.749.358
Diterima dari Entitas Lain	(444.893.750)
<b>Jumlah</b>	<b>4.984.750.058</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

#### E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 September 2023, DKEL sebesar Rp 5.318.749.358, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 444.893.750

#### E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 30 September 2023 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2023

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 30 September 2023 sebesar Rp110.894.450 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Lap Top (2 Buah)	Kantor Pusat LPP RRI	31.062.500
Kabel (1 Buah)	Kantor Pusat LPP RRI	4.246.550
Receiver STL/VHF (FM) (1 Buah)	Kantor Pusat LPP RRI	33.818.950
Peralatan Antena Penerima VHF (2 Buah)	Kantor Pusat LPP RRI	7.947.500
Power Transmitter (1 Buah)	Kantor Pusat LPP RRI	33.818.950
<b>Jumlah</b>		<b>110.894.450</b>

Ekuitas Akhir  
Rp.13.669.180.732

### E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.13.669.180.732,00 dan Rp.13.058.218.569,00.